

Gajah di dalam Kamar: Solipsisme dalam Psikologi dan Analisis Diskursus Foucauldian sebagai Kritik

Rifki Akbar Pratama

KUNCI Cultural Studies

Abstract. This article aimed to describe the problematic situation in the practice of psychological approaches. Often in explaining social phenomena, psychology caught up in the praxis of individualist method: a tendency of psychological method that overly believes that individual problems are caused by individuals themselves and can only be explained through personal perspectives. This fallacy is a trap that threatens the conclusions produced by psychology with a biased perspective. Specifically, this article intends to promote the research that was before carried out by the author about the decision-making process of releasing the land of coastal land farmers in Kulon Progo (Pratama 2018). This research uses a Foucauldian Discourse Analysis (FDA). In short words, the author wants to show that the FDA can be used to understand the dynamics of farmers' way of thinking as an individual and social context. On the other hand, this paper would like to show how the FDA can be used as an example of perspectives that do not merely use the individualist method that has become the mainstream in Indonesian's psychological research Indonesia.

Keywords: individualism method, foucauldian discourse analysis, critical psychology, decision making, peasant

Pendahuluan

Seseorang boleh jadi dapat dengan mudah mengabaikan keberadaan seekor gajah di dalam kamar. Akan tetapi, ia membutuhkan dalih yang lebih mantap saat kamar yang sama menjadi begitu gelap karena keberadaan sang gajah. Perumpaan yang sama diam-diam membayangi upaya penjelasan atas fenomena yang bersandar pada psikologi secara umum di Indonesia. Pokok perkara yang menghadirkan ganjalan ialah dominannya corak individual dalam berbagai penjelasan ilmiah berdasar kajian psikologi. Ekses yang muncul ialah psikologi hampir pasti dapat digunakan untuk membantu *mengungkap alasan* mengapa seseorang melakukan sesuatu. Namun, psikologi tak serta merta dapat dipakai untuk *menemukan alasan bagi penjelasan* mengapa orang tersebut akhirnya melakukan suatu

Korespondensi Penulis

Rifki Akbar Pratama, KUNCI Cultural Studies, Yogyakarta.

Email: rifkiakbarp@gmail.com

hal. Problem ini perlu dikaji ulang mengingat penjelasan ialah ciri dari sains itu sendiri. Tanpa gairah mendekati eksplanasi, psikologi akan gugur sebagai sains, dan terjatuh menjadi sekadar nalar wajar (*common sense*). Tanpa upaya penjelasan, psikologi sebagai ilmu tak ubahnya aktivitas menimbang berat bayangan seekor gajah: tak menemukan bobotnya sama sekali.

Gajah di dalam kamar ialah sebuah idiom yang menggambarkan situasi problematik. Situasi yang menuntut sebuah jawaban tetapi sering diabaikan karena jauh lebih mudah bila tidak dibicarakan atau dipertanyakan. Pengabaian ini membayangi pula kajian psikologi karena upaya penjelasan atas fenomena sosial seringkali tersandung di ranah metodologi. Mayoritas pendekatan umum yang dipakai sebagai cara mendekati fenomena masih diliputi satu problem mendasar, yakni individualisme metodologis. Apa yang disebut terakhir menggambarkan kecenderungan untuk percaya bahwa perubahan individual disebabkan oleh individu dan hanya dapat dijelaskan pula melalui sudut pandang personal. "Tercakup di dalamnya bukan hanya 'diri' sebagai pelaku tindakan yang paling absah, tetapi juga 'diri' sebagai satu-satunya instansi yang paling tahu tentang hasratnya" (Herry-Priyono, 2006 dalam Wibowo, Suseno, & Herry-Priyono, 2006). Secara sadar maupun tidak, diam-diam individu yang memakai kerangka pikir ini mengabaikan upaya penjelasan yang bercorak holisme. Sebuah posisi berlawanan yang percaya bahwa kondisi sosial-lah yang memungkinkan perubahan sosial maupun perubahan individual. Tendensi ke arah individualisme metodologis ini salah satunya didorong oleh intensitas fokus penelitian psikologi yang mengarah pada upaya mendudukan penjelasan atas fenomena sosial semata-mata ke proses mental individual.

Kecenderungan ini muncul bukan tanpa alasan. Setidaknya ada dua hal yang dapat menjelaskan mengapa pendekatan ini kemudian jamak dipakai. *Pertama*, karena klaim keilmuwanan pengkaji psikologi kerap kali diukur berdasarkan kemampuannya dalam menjelaskan proses mental individual yang kerap dijadikan sebagai pembeda dengan bidang kajian lain (seperti antropologi atau sosiologi). Hal tersebut kemudian menempatkan kerja mental individu menjadi fokus produksi penelitian bagi para ilmuwan psikologi. *Ke-dua*, ialah konsepsi orang di luar bidang kajian psikologi terhadap ilmu psikologi itu sendiri. Konsepsi bahwa psikologi menyuguhkan suatu pengetahuan tentang jiwa manusia pun solusi atas permasalahan jiwa masih jamak beredar (Madyaningrum, 2010). Cara pandang ini turut menjadi prakondisi bagi ilmuwan psikologi, sebagai produsen pengetahuan, untuk lantas mereproduksi pengetahuan yang mengakomodir bayangan tersebut. Tak lain tak bukan, karena dengan begitu *klaim* ilmuwan psikologi, bahwa ilmunya dapat dipakai untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena sosial tetap terjaga.

Kiranya, untuk beberapa persoalan, psikologi yang bercorak individual ini dapat digunakan untuk mempertajam perspektif, membantu proses analisis dalam konseling, juga menumbuhkan empati pada subjek. Akan tetapi, sebagai landasan bagi upaya mengembangkan khazanah keilmuwanan psikologi sendiri pendekatan tersebut disertai beberapa persoalan. Pertama, ialah perihal kecenderungan kajian psikologi untuk mendasarkan diri pada penjelasan yang mengacu pada ingatan, pengakuan, juga

evaluasi subjektif. Hal ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan. Seperti, bagaimana kita dapat menganggap sesuatu sebagai sains bila semata-mata mengandalkan kebenarannya pada ‘kata-kata’ satu orang? Bagaimana cara kita percaya pada orang tersebut di satu sisi dan terhindar juga untuk dibohongi secara mentah-mentah? Handayani (2002) di jurnal ini telah mengangkat problem yang sama, dengan mengambil salah satu kasus Freud sebagai contoh, lantas *menggarisbawahi* bahwa “bukankah pengabaian konsepsi tentang kesalahan akan berakibat diabaikannya sesuatu yang sebenarnya sangat penting?”

Persoalan kedua yang muncul dari jalur penjelasan psikologi yang bercorak individual dalam upaya mengurai sebuah fenomena ialah jebakan solipsisme. Sebuah kekeliruan yang menganggap satu-satunya pengetahuan yang sah dan mungkin untuk menjelaskan perilaku individu ialah pengetahuan yang berasal dari individu itu sendiri. Dengan menitikberatkan pada penjelasan individual kita akan terjebak pada alur memutar. Alih-alih penjelasan tentang *pelbagai kondisi yang memungkinkan* sebuah tindakan terjadi, apa yang didapat ialah sesuatu yang liar. *Segala sesuatunya dianggap mungkin* menjadi alasan, persis karena bergantung pada pengakuan dan penilaian individu. Penjelasan atas realita atau fenomena yang terjadi kemudian menjadi begitu relatif karena bergantung pada penilaian individu. Di tataran logika ketika kita mengamini sebab dari suatu tindakan semata-mata ialah preferensi individu, upaya penjelasan yang digelorkan akan terbentur pada *reductio ad absurdum*, atau pencarian penjelasan tanpa akhir.

Apa yang mungkin dikorbankan di sini adalah upaya kajian psikologi menyuguhkan cara untuk mendekati kebenaran. Dengan mengabaikan jalur lain, yakni holisme metodologis—yang menawarkan penjelasan mengenai kondisi sosial yang tidak direduksi ke ranah individual—psikologi rawan terjebak pada upaya justifikasi atas kerangka pikir maupun konsep-konsep yang dibentuknya sendiri. Hal yang juga telah menjadi fokus kritik Hartoko (2002) dalam jurnal ini, bahwa “model riset psikologi yang selama ini digunakan, yang mencoba memperhatikan perkaitan (juga hubungan sebab-akibat di dalam studi eksperimental) antarvariabel yang diasumsikan digunakan/dipertunjukkan dan dimiliki oleh individu-individu, kurang memperhatikan secara serius *setting* di mana macam-macam variabel psikologi diperagakan dalam modus normal kehidupan sehari-hari.” Konsekuensinya fenomena yang terjadi di ranah sosial kemudian dimengerti semata-mata hanya sebagai agregat dari perilaku individu.

Bila merujuk logika tersebut sebagai dasar berpikir, apa yang perlu dijelaskan oleh peneliti ialah corak-corak sifat yang dianggap melekat pada diri individu. Seperti halnya yang sudah jauh-jauh hari disinggung oleh Ian Parker, “psikologi yang dominan sekarang ini dibimbing oleh suatu konsep rasionalitas khusus, diskursus di mana seseorang mengatribusikan pada diri individu suatu keadaan mental internal, yang kita andaikan, mengarahkan perilaku (Costall dan Still, 1987 dalam Parker, 1992). Alhasil, sejalan pula dengan pendapat Hartoko (2002), para pengkaji psikologi kemudian “menjumpat individu-individu sebagai person yang terisolasi dan menggabungkannya sebagai

agregat.” Konsekuensinya psikologi bertendensi menanam konsep secara deduktif dalam kenyataan bukan melakukan hal yang sebaliknya: menjelaskan kenyataan. Psikologi lantas berfungsi “sebagai alat untuk memberikan label” dan “justru menjadi (sebuah) lompatan kesimpulan untuk mendefinisikan keadaan...” (Widiyanto, 2017). Di sisi yang lain, eksek dari solipsisme ini adalah pelimpahan tanggung jawab. Kita bisa melihat contoh fenomena ini di ranah kesehatan mental. Ketika opsi yang disuguhkan adalah melihat individu sebagai individu yang bermasalah maka upaya penyelesaian masalah akan menempatkan individu sebagai titik sentral. Apa yang tersembunyi dalam cara pikir ini ialah tendensi “*blaming the victim*”.

Kecenderungan penjelasan psikologi bercorak individual ini ialah fokus pada karakter psikologis yang dipandang inheren dimiliki oleh individu melalui pelbagai konsepsi tentang ciri mental dan seolah tak tersituasikan oleh keadaan sosial. Persoalan mendasar dari kecenderungan ini ialah penempatan masalah sebagai problem yang secara internal berada di dalam diri. Kita dapat mengambil contoh terkait ini ketika depresi kemudian dilokalisasi sebagai bentuk pengalaman individual dan coba digali di ranah yang sama. Opsi-opsi lain yang mungkin menjadi penjelasan berangsur lenyap tak terpikirkan. Sebagaimana contoh opsi berikut: seseorang dipandang mengalami kondisi depresi bukan hanya karena proses mentalnya terarah secara intens pada isi pikirannya sendiri atau memakai mekanisme pertahanan diri yang tak tepat, tetapi lebih sebagai akibat dari lingkungan pertemanan. Lingkup pertemanan yang kurang suportif dan mengondisikan seseorang untuk dalam kondisi depresif karena terus-terusan memperbandingkan pencapaian sebagai ukuran keberhasilan akan terabaikan dari pembahasan akibat kecenderungan tadi. Dalam bentuk yang lain, kita bisa menemukan pola yang sama saat masalah prestasi belajar yang tak memenuhi standar dicoba digali melalui penyelidikan tentang atribut motivasi. Prestasi buruk dengan demikian lebih dilihat sebagai kurangnya motivasi individu dibandingkan karena sistem pembelajaran yang tak mendorong munculnya keingintahuan lebih ataupun tolok ukur yang menafikan *tacit knowledge*. Dengan kata lain, alih-alih mengurai pola yang membuat sebuah fenomena mengemuka psikologi justru menempatkan korban sebagai pokok permasalahan.

Sesat pikir yang membawa dampak etis tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya “psikologi bukan cuma kerangka teoretis, melainkan juga sebuah praktik sosial” (Widiyanto, 2017). Dengan demikian, sebuah upaya penjelasan yang tepat tak hanya berfungsi untuk menjelaskan fenomena tetapi juga memungkinkan kita untuk mengubahnya bila realita yang diuraikan ternyata mengandung ketimpangan. Apa yang perlu diupayakan ialah mendasarkan diri pada metode yang dapat mengakomodir pembahasan tentang pengalaman individual di satu sisi dan membuka perbincangan perihal situasi sosial-material yang menopang serta memungkinkannya di sisi yang lain. Metode yang tidak hanya memperjelas hal-hal yang tidak disadari oleh individu dan mengarahkan gerak perilakunya melainkan juga mencari duduk perkara yang membuat hal-hal tersebut tidak disadari. Dengan kata lain, menyuguhkan alternatif jawaban bagi pertanyaan Widiyanto (2017), terkait

“bagaimana artikulasi teoretis tempat ‘psikologi’ individu dan struktur sosial dikembangkan untuk memberikan jarak kritis dari ideologi?” Dalam kesempatan ini Analisis Diskursus Foucauldian (ADF) ialah tawaran metode yang diajukan guna mengatasi problem yang diajukan tersebut.

Analisis Diskursus Foucauldian dan Upaya Mengatasi Solipsisme

Dalam rangka menghindar dari jerat individualisme metodologis, pembahasan terkait struktur sosial ialah hal yang perlu diikutsertakan di tengah proses analisis. Meskipun demikian, perlu diingat posisi ini juga perlu mengakomodir gagasan bahwa “masyarakat mestilah sebuah struktur (atau sebuah rangkaian kekuasaan) yang tidak dapat direduksikan pada, tetapi hanya hadir dalam bentuk, tindakan intensional manusia” (Bhaskar, 2008). Oleh karena itu, fokus kajian perlu pula membahas bagaimana struktur sosial mengerangkai cara berpikir maupun cakrawala tindakan seseorang. Seturut logika ini pembahasan mengenai diskursus sebagai objek kajian menemukan relevansinya. Diskursus sebagai objek kajian menempati posisi potensial karena sebagaimana argumen Parker (1992), “diskursus memfasilitasi dan membatasi, memungkinkan, dan mengungkung apa yang dapat dikatakan, oleh siapa, kapan, dan di mana,” hal tersebut dikatakan.

Peranan diskursus dengan demikian menyediakan ruang bagi pembahasan tentang struktur sosial yang melingkupi subjek. Di sisi lain, seperti yang dikemukakan Willig (2013) diskursus juga “memungkinkan suatu cara pandang tertentu dalam melihat dunia juga suatu cara hidup di dunia secara tertentu pula”. Gagasan ini mendorong kemungkinan analisis diskursus untuk membuka kemungkinan memperbincangkan “posisi-posisi subjek, yang bila diamini, menghadirkan implikasi bagi subjektivitas dan pengalaman” (Willig, 2013). Dengan demikian, analisis diskursus menyuguhkan pula detail mengenai pengalaman mental subjek. Hal ini dimungkinkan karena upaya analisis diskursus akan berurusan dengan pemaknaan individual subjek. Karena, seperti halnya yang telah ditekankan Parker (1992) bahwa, “kita dapat menemukan diskursus di dunia ini di mana saja terdapat makna.”

Gagasan soal makna ini secara tidak langsung mengurai landasan dasar analisis diskursus yang menempatkan bahasa pada posisi yang penting dalam proses analisis. Secara historis titik balik ke bahasa ini merupakan awal mula kemunculan penggunaan analisis diskursus dalam kajian psikologi. Sejak 1980’an, sebagai alternatif dari kognitivisme dalam psikologi, “fokus penyelidikan beralih dari individu dan intensinya ke bahasa serta potensi produktifnya” dalam melukiskan atau mengkonstruksi realitas sosial (Willig, 2013). Terutama karena bahasa, atau dalam bentuknya yang lebih memungkinkan dibaca dan dianalisis—yakni teks, dianggap tidak serta merta menghantarkan arti harfiah tetapi memuat suatu makna dan mewakili posisi tertentu dari subjek yang berbicara. Seturut pendapat Parker (1992) “diskursus menyediakan suatu kerangka pemikiran untuk mempersoalkan

keuntungan membicarakan kenyataan dengan satu cara dibandingkan cara yang lain.” Konsepsi inilah yang juga menjadi titik tolak dalam psikologi diskursif (*discursive psychology*) terutama karena “perhatian utamanya berkenaan dengan komunikasi interpersonal” (Willig, 2013). Di titik ini pulalah Analisis Diskursus Foucauldian (ADF) kemudian menempuh jalan yang berlainan.

Psikologi diskursif secara mendasar memberikan porsi utama pada “bagaimana seseorang memakai sumber-sumber diskursus demi mencapai suatu tujuan dalam interaksi sosial” (Willig, 2013). Sedangkan ADF, seperti yang dicatat Willig (2013), mengarahkan perhatian pada “sumber-sumber diskursif yang tersedia untuk orang-orang dan bagaimana diskursus mengkonstruksi subjektivitas, kedirian, dan relasi kuasa.” Arah yang berbeda ini mengurangi tendensi individualisme metodologis dalam psikologi diskursif. Persis karena psikologi diskursif masih memusatkan perhatiannya pada individu dengan bersandar pada upaya mengungkap hal-hal yang dipertaruhkan ataupun nuansa kepentingan-kepentingan tertentu dalam sebuah percakapan. Di sisi yang lain, psikologi diskursif juga tidak menyentuh “pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan subjektivitas—yakni, konsepsi kedirian kita, termasuk ke dalamnya intensionalitas, kesadaran diri, dan memori autobiografis” (Willig, 2013).

Hal yang sebaliknya dimungkinkan dalam ADF, lantaran analisis didasari pengandaian diskursus memiliki suatu kuasa untuk mengkonstruksi subjek. Analisis dalam ADF akan mengurai tentang “seperti apa objek dan subjek dikonstruksi melalui diskursus dan cara hidup seperti apa yang dimungkinkan dengan konstruksi objek dan subjek semacam itu untuk seseorang” (Willig, 2013). Michel Foucault sendiri menggarisbawahi bahwa apa yang dia upayakan ialah “menciptakan sebuah catatan sejarah mengenai berbagai macam cara, bagaimana dalam budaya kita, seseorang dibentuk menjadi subjek” (Foucault, 1983). Di sisi lain, ADF seperti yang telah digarisbawahi Carla Willig memiliki posisi yang lebih ambisius daripada psikologi diskursif. Hal ini berkenaan dengan klaim bahwa analisis akan meliputi sistem-sistem simbolis (termasuk ke dalamnya bahasa), subjektivitas, dan juga relasi sosial dibandingkan hanya memberikan perhatian pada komunikasi interpersonal (Willig, 2013).

Seturut logika yang sama, perhatian ADF terhadap bahasa kemudian melampaui konteks langsung penggunaan bahasa yang dipakai oleh seseorang dalam sebuah percakapan. Dalam taraf analisis, ADF dapat digunakan untuk mengeksplorasi “ketersediaan sumber-sumber diskursus yang berada di dalam budaya—sesuatu semacam diskursus ekonomi—dan implikasinya bagi seseorang yang hidup di dalamnya” (Willig, 2013). ADF pun akan mendorong kita untuk menggulirkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan “hubungan antara diskursus dan bagaimana seseorang berpikir atau merasa (subjektivitas), apa yang mungkin mereka lakukan (praktik) dan kondisi material tempat pengalaman-pengalaman seperti itu dimungkinkan terjadi” (Willig, 2013). Upaya penjabaran tentang kondisi material ini pula yang memungkinkan ADF, meski memulai analisis pada tataran makna tetap membuka kemungkinan penjelasan di luar evaluasi subjektif. Hubungan antara diskursus dan

kerangka pikir dalam ADF juga dapat menghindarkan dari logika bahwa bahasa yang membentuk pandangan kita akan realita sosial bukannya sebagai cermin dari realita itu sendiri. Dengan begitu ADF juga menghindarkan kita dari jebakan logika yang berpatokan pada argumen bahwa semua hal secara mendasar bergantung pada persepsi individual.

Opsi yang diberikan ADF demi mengatasi tendensi yang sama ialah perhatian atas hubungan antara diskursus dan institusi. Bahasa tetaplah menempati posisi penting sebagai objek kajian dalam ADF tetapi “diskursus tidak (lantas) dikonseptualisasikan sesederhana sebagai cara mengatakan atau menuliskan sesuatu. Sebaliknya, diskursus dilihat bertaut dengan praktik institusional—dengan kata lain, berkaitan dengan cara mengorganisir, mengatur, dan juga mengelola kehidupan sosial” (Willig, 2013). Teks dalam ADF dilihat secara luas sebagai suatu “jejaring makna (diskursus) yang menyusun realita sosial dan psikologis” seseorang (Willig, 2013). Secara mendasar kerangka berpikir ini berpotensi digunakan untuk mengurai bagaimana cara seseorang melihat dunia dengan batasan cakrawala sebuah diskursus tertentu. Batasan yang umumnya hadir dalam bentuk anggapan bahwa realita yang dihadapi memang begitulah adanya. Realita menjadi begitu normal karena terselubungi oleh diskursus yang sudah diamini sebagai nalar berpikir yang wajar.

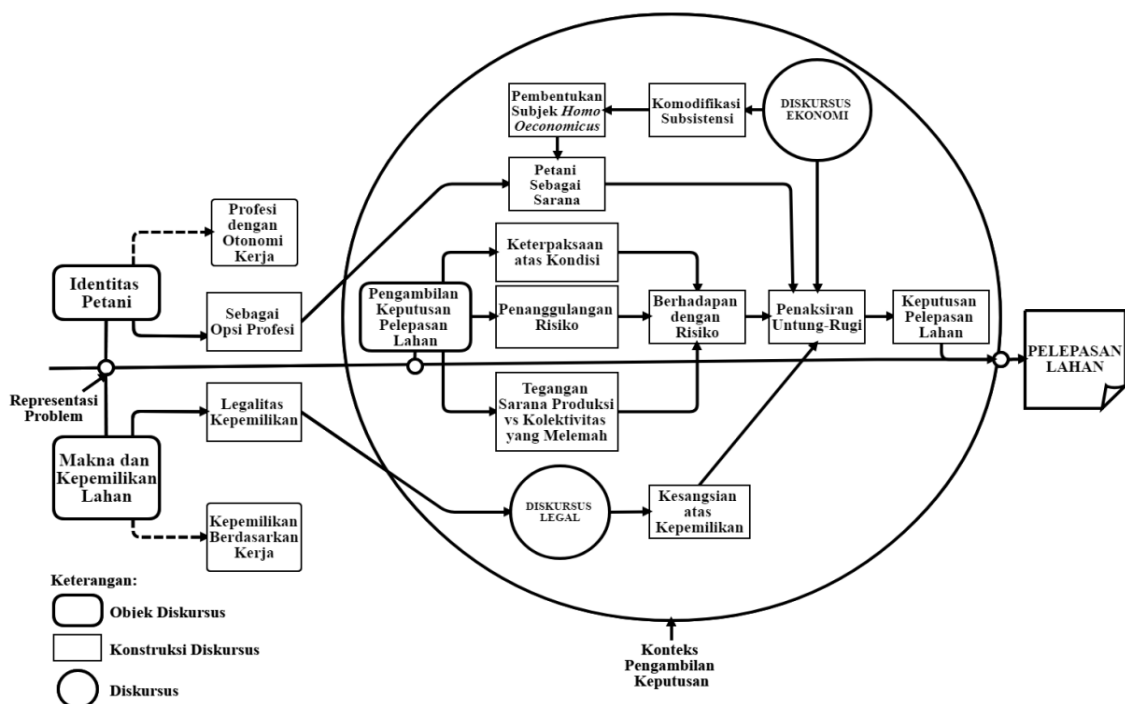
ADF memiliki peranan menyingkap lubang logika ini dengan menjabarkan bagaimana cara diskursus dominan bekerja dan menyuguhkan privilese bagi suatu bentuk realita sosial yang dianggap natural. Suatu bentuk realita yang sebenarnya melegitimasi relasi kuasa juga struktur sosial dalam masyarakat. Upaya mengurai logika tersebut yang memungkinkan ADF membuka percakapan perihal keterkaitan diskursus dengan institusi ataupun struktur sosial yang kemudian melanggengkan suatu cara berpikir tertentu—dengan kata lain menopang dan mengamini diskursus terkait. Dalam artikel ini, penggunaan ADF dalam konteks pengambilan keputusan petani oleh penulis dipakai sebagai contoh untuk menjabarkan ADF lebih lanjut.

Keputusan dan Keputusasaan: ADF dalam Pengambilan Keputusan Petani

Pada bagian berikut penulis akan menjabarkan ADF lebih lanjut dengan merujuk pada enam tahapan yang digagas oleh Willig (2013) dan secara ulang-alik memakai hasil penelitiannya tentang pengambilan keputusan petani (Pratama, 2018) sebagai ilustrasi analisis. Apa yang perlu digarisbawahi, seperti yang telah dikemukakan juga oleh Willig (2013), enam tahapan yang dipaparkan berikut tak lantas menghasilkan “sebuah analisis yang lengkap dalam corak Foucauldian”. Michel Foucault sendiri memberi penekanan lebih jauh dalam gagasannya berkenaan dengan relasi diskursus, sejarah, dan kepengaturan (*governmentality*) yang belum sepenuhnya terakomodir secara langsung dalam ADF (Rose, 1999 dalam Willig, 2013). Meskipun begitu enam tahapan berikut menurut hemat penulis dapat dijadikan sebagai pintu awal analisis sebelum mengaitkannya dengan

konsep-konsep Foucault yang lain.

Seperti yang telah digagas Willig (2013), analisis data dalam ADF akan meliputi enam tahapan analisis diskursus. Tahapan yang diuraikan ini menyuguhkan gambaran umum atas diskursus-diskursus yang beredar serta posisi-posisi subjek yang dimungkinkan di tengah konfigurasi diskursus tersebut. Tahapan-tahapan yang disuguhkan di sini juga akan membawa pembahasan ke arah subjektivitas serta praktik yang dimungkinkan mengacu pada diskursus yang tersedia. Enam tahapan yang dipakai dalam ADF seturut paparan Willig (2013) terdiri dari 1) konstruksi diskursus, 2) pemaparan diskursus-diskursus, 3) orientasi aksi, 4) pemosisian, 5) praktik, dan 6) subjektivitas. Dalam bagian ini hasil penelitian penulis atas pengambilan keputusan petani atas pelepasan lahan (Pratama, 2018) akan dimanfaatkan sebagai sarana ilustrasi proses analisis diskursus.



Skema ilustrasi hasil analisis ADF atas pengambilan keputusan pelepasan lahan oleh petani (Pratama, 2018).

Mengikuti apa yang dikemukakan Foucault (1972), dalam analisis diskursus kita nantinya akan menemukan suatu ‘tatanan dari objek-objek’. Hal yang menjadi konsekuensi logis lantaran “analisis secara mendasar memerlukan suatu derajat objektifikasi tertentu” (Parker, 1992). Diskursus dengan demikian ialah sesuatu yang berkaitan dengan objek-objek, sedang analisis diskursus ialah tentang *diskursus* sebagai objek itu sendiri. Tugas analisis menurut Foucault (1972) ialah “tak lagi memperlakukan diskursus-diskursus sebagai suatu kelompok penanda (elemen penanda yang mengacu pada suatu isi atau representasi) tetapi sebagai sebuah praktik yang secara sistematis menyusun objek-objek yang (sedang) dibicarakan.” Seturut itu pada tahapan pertama analisis setiap objek diskursus ditelusuri guna melihat bagaimana dan dalam bentuk apa saja objek tersebut dikonstruksi. Apa yang

akan menjadi objek diskursus bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan. Willig (2013) memberi contoh, semisal kita tertarik tentang bagaimana individu berbicara tentang ‘cinta’ dan apa konsekuensinya, maka objek diskursus yang akan dibahas ialah ‘cinta’. Dalam bagian berikut ini keenam tahapan dipaparkan lebih lanjut beserta ilustrasi hasil analisis yang dapat dilihat dalam skema di atas. Berikut ini paparan lebih lanjut dari keenam tahapan analisis diskursus tersebut:

Konstruksi Diskursus

Tahapan pertama analisis ADF melibatkan identifikasi dari berbagai cara objek diskursus dikonstruksi dalam teks. Pada tahapan ini berbagai hal yang mengacu pada objek diskursus disoroti. Tidak hanya kata kunci-kata kunci eksplisit yang merepresentasikan objek diskursus yang mendapat perhatian tetapi juga acuan implisit atas objek diskursus dalam teks. Selain itu, penekanan diberikan pada makna yang dibagi bersama dibanding hanya berfokus pada perbandingan kosakata—kesamaan ataupun perbedaan—dalam pencarian konstruksi objek diskursus. Identifikasi mengenai bagaimana objek wacana dikonstruksi dalam narasi para informan adalah hal yang kemudian dilakukan. Mengacu pada penelitian penulis (Pratama, 2018) yang secara sederhana berupaya menggambarkan keputusan pelepasan lahan petani yang dialihfungsikan menjadi tambang konsep tersebut dapat diilustrasikan. Bagaimana para petani mengonstruksi objek-objek berkenaan dengan pengambilan keputusan pelepasan lahan serta implikasi apa yang muncul darinya kemudian dijadikan fokus pada tahap ini.

Apa yang ditelusuri tidak hanya mengarah pada berbagai kata kunci-kata kunci yang ditemukan dalam narasi, tetapi juga pelbagai hal yang secara implisit tersembunyi dalam narasi yang disampaikan para informan. Terutama karena seperti yang Willig (2013) kemukakan, “fakta bahwa sebuah teks tidak memuat acuan langsung terhadap objek diskursus dapat menunjukkan banyak hal pada kita tentang bagaimana objek diskursus tersebut dikonstruksi”. Mengacu pada hal tersebut, serta mengarahkan fokus pada pengambilan keputusan pelepasan lahan (Pratama, 2018) kita melihat ada tiga objek yang diandaikan akan mewakili subjek dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga objek itu ialah objek yang dilihat merepresentasikan identitas subjek sebagai seorang petani, keterkaitannya dengan objek material riil (dalam hal ini lahan), dan juga praktik (pengambilan keputusan). Merujuk hal tersebut, “identitas petani”, “makna akan lahan serta makna akan kepemilikan lahan”, serta “pengambilan keputusan pelepasan lahan” kemudian menempati posisi sebagai objek diskursus yang kemudian dianalisis.

Apa yang didapat dari proses ini ialah konstruksi diskursus atas tiga objek yang telah ditentukan di awal. Identitas petani dilihat sebagai dua hal: profesi dengan otonomi kerja dan petani sebagai sebuah opsi profesi. Di sisi lain, makna lahan serta perihal kepemilikan lahan dipersepsi menjadi dua bentuk, bergantung pada suatu konsepsi legal atas kepemilikan lahan sebagai satu konstruksi dan

pandangan bahwa kepemilikan lekat dengan kerja yang dicurahkan. Sedangkan berkenaan dengan pengambilan keputusan muncul tiga cara pandang, yakni pelepasan sebagai keterpaksaan atas kondisi, sebagai sarana penanggulangan risiko (yang muncul bila tetap mempertahankan lahan), dan adanya tegangan antara melemahnya kolektivitas dengan kebutuhan akan sarana produksi. Proses analisis di tahapan ini berpotensi untuk mengurai tindakan-tindakan yang nampak serupa tetapi dilatarbelakangi oleh motif yang berlainan dan kompleks.

Pemerian Diskursus-diskursus

Setelah mengidentifikasi semua bagian dari teks yang berperan dalam konstruksi atas objek diskursus, tahap kedua ini berfokus pada perbedaan-perbedaan antara pelbagai konstruksi yang muncul. Apa yang tampak seperti objek diskursus yang tunggal dan serupa dapat dikonstruksi secara berlainan. Pada tahapan kedua ini analisis kemudian mengarahkan fokus pada menempatkan berbagai konstruksi atas objek diskursus dalam konstelasi diskursus yang lebih luas. Hal ini coba diupayakan dengan menyelidiki diskursus apa saja yang mengarahkan individu mengonstruksi objek diskursus seperti yang telah dipaparkan dalam tahap pertama. Hal ini sebenarnya sejalan dengan asumsi ontologis dalam ADF, yang menekankan bahwa “tidak ada satu ‘dunia’ yang dapat dideskripsikan dan dipelajari, sebaliknya ada banyak versi dari dunia, yang masing-masing dapat dikonstruksikan melalui diskursus dan praktik” (Willig, 2013).

Pada tahap kedua ini, konstruksi-konstruksi atas objek diskursus yang digali pada tahap pertama ditempatkan dalam logika konstruksi diskursus yang lebih luas. Perbedaan yang muncul di antara pelbagai konstruksi coba dipetakan setelah identifikasi dilakukan terhadap seluruh narasi informan dan bagaimana serta dalam bentuk apa saja objek diskursus dikonstruksi ditemukan. Pada tahap ini diskursus umum yang muncul dan mengerangkai konstruksi objek pada tahapan pertama coba dipaparkan dan dielaborasi. Secara umum dalam penelitian penulis (Pratama, 2018), yang dipakai sebagai sarana ilustrasi ada dua kerangka diskursus yang mengemuka; yakni diskursus ekonomi dan diskursus legal. Dua diskursus utama ini terbentang membentuk suatu cakrawala bagi sudut pandang subjek. Diskursus ekonomi bekerja mengerangkai suatu pandangan yang mengacu pada penaksiran untung-rugi yang menjadi ciri *homo oeconomicus*. Cara pandang ini mengerangkai pandangan subjek yang menilai petani sebagai sebuah sarana dalam wujud opsi atas profesi alih-alih sebagai identitas yang memuat nilai dan sikap tertentu. Di sisi lain, pemaknaan atas kepemilikan lahan berdasar pencurahan kerja tertangguhkan karena gerak logika yang terjerat diskursus legal. Pada tahapan ini, kita dapat melihat kemungkinan-kemungkinan diskursus yang bekerja di taraf pemikiran mengarah dan merujuk pada suatu basis material yang riil (seperti sarana produksi maupun berkas legal).

Orientasi Aksi

Pada tahapan ketiga, analisis mengikutsertakan penelusuran yang lebih mendalam atas konteks dari pelbagai konstruksi terhadap objek diskursus yang muncul dan digunakan oleh subjek. Terutama guna melihat apa yang secara tersirat didapatkan subjek dari konstruksi objek diskursus melalui cara konstruksi tersebut. Selain itu tahapan ini juga berupaya untuk melihat fungsi apa yang dijalankan dari konstruksi tersebut dan hubungannya dengan pelbagai konstruksi diskursus yang muncul dan melingkupi teks. Willig (2013) merujuk hal ini sebagai orientasi aksi. Sebagai permisalan, ia memberi contoh saat seorang istri membicarakan mengenai kanker yang dialami suaminya. Pemakaian diskursus medis memungkinkan sang istri untuk mengatribusikan tanggung jawab terkait diagnosis dan perawatan terhadap profesional di bidang medis dan di saat yang sama menekankan bahwa suaminya ia perhatikan dan coba rawat dengan baik. Fokus pada orientasi atas aksi yang mungkin dilakukan berdasar diskursus yang mengemuka ialah yang menjadi fokus pada tahapan ketiga. Penekanan atas hal tersebut menjadi penting karena memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tendensi aksi yang mungkin dilakukan subjek. Hal yang dimungkinkan tereksplorasi berkat paparan tentang pelbagai potensi dimungkinkannya suatu hal terjadi berdasar varian konstruksi atas objek diskursus.

Seperti yang telah dicatat pula oleh Willig (2013), pada tahapan ini kita dapat melihat bagaimana diskursus mengerangkai apa yang kemudian menjadi perhatian subjek. Di sisi yang lain, tahapan ini juga mengurai sejauhmana diskursus memenuhi fungsi penjelas bagi pengandaian atas tanggung jawab yang diemban subjek. Selain itu, juga berkenaan dengan bagaimana diskursus menempatkan subjek pada suatu posisi tertentu di tengah tatanan moral yang tersedia. Bila mengacu pada penelitian penulis (Pratama, 2018) konstruksi atas identitas petani memberikan bayangan pandangan subjek atas posisi petani sebagai suatu sarana yang bertaut dengan penaksiran untung-rugi. Konstruksi yang berada di bawah payung diskursus ekonomi ini mengerangkai persepsi petani yang dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan lantaran menyediakan sarana mobilitas sosial serta memiliki otonomi atas kerja. Di sisi yang lain, masih di bawah kerangka yang sama, profesi petani juga diposisikan sebagai pilihan yang diambil atas dasar keterbatasan akses terhadap pelbagai profesi lain. Hal ini bertaut pula dengan kekhawatiran subjek berkenaan dengan kepemilikan lahan yang dilingkupi konstruksi diskursus legalitas lahan yang menyiratkan kesangsian atas keamanan posisi legal. Kerangka pikir yang demikian menjadi dasar umum penilaian bahwa secara normatif keputusan pelepasan lahan merupakan sebuah konsekuensi logis. Masih berkaitan dengan konstruksi-konstruksi tersebut, proses pengambilan keputusan pelepasan lahan juga kemudian dipandang sebagai sebuah sarana penanggulangan risiko dan sebagai suatu tindakan bertanggungjawab: baik terhadap keluarga maupun lingkungan sosial.

Pemosisian

Pada tahap keempat ini, yakni pemosisian, dikemukakan pengandaian posisi subjek seperti apa yang muncul berpatokan pada diskursus-diskursus yang telah digali sebelumnya. Posisi subjek dalam sebuah wacana diandaikan melukiskan 'lokasi tertentu bagi orang-orang dalam struktur yang menunjukkan hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan kisi-kisi interpretasi itu' (Davies dan Harre, 1999 dalam Harre dan Langenhove, 1999). Lebih jauh, "setelah seseorang mengambil suatu posisi khusus, ia tidak dapat mengelak untuk melihat dunia dari sudut pandang yang mengemuka dari posisi tersebut. dan dalam bentuk, gambaran, metafor, alur cerita juga konsep yang dianggap relevan dengan praktik diskursif tempat mereka diposisikan" (Davies dan Harre, 1999 dalam Harre dan Langenhove, 1999). Mengacu pada hal tersebut, penulis mencoba menelusuri bagaimana konsepsi itu diekspresikan (Pratama, 2018). Terutama berkaitan dengan bagaimana pelepasan lahan dijustifikasi berdasarkan posisi-posisi yang tersedia bagi para petani dalam konstruksi diskursus.

Berkenaan dengan identitas petani ada dua modus pemosisian yang mengemuka. Pertama, konstruksi identitas petani yang dilihat sebagai profesi yang didasarkan pada penaksiran untung-rugi yang berpangkal pada penaksiran kegunaan atau utilitas. Dari konsepsi ini manusia ekonomi yang rasional ialah posisi subjek yang ditawarkan. Kedua, sebagai profesi dengan otonomi atas pola kerja. Konsepsi ini didasari kebebasan dari kekangan waktu kerja serta jeratan pola kerja bila dibandingkan dengan pekerja upahan. Posisi yang mengemuka ialah subjek otonom yang memiliki kebebasan akan pilihan terkait kerja-kerja yang dilakukan pun penentuan atas waktu kerjanya sendiri. Di sisi yang lain, berkaitan dengan persoalan kepemilikan lahan, friksi berkenaan dengan legalitas kepemilikan lahan menyuguhkan posisi yang problematis. Dua posisi mengemuka terkait kepemilikan lahan ini. Pertama, posisi sebagai seorang subjek yang mengambil risiko melalui jalan nonformal tanpa adanya jaminan dengan acuan kepemilikan lahan berdasarkan pencurahan kerja. Kedua, tersedia pula posisi subjek yang diberkahi jaminan atas legalitas tetapi perlu menghadapi risiko saat bertarung di ranah legal. Kedua posisi terkait identitas dan kepemilikan lahan itu bertaut dengan pemosisian yang terbayangkan pula pada konteks pengambilan keputusan pelepasan lahan.

Di sisi yang lain, berkenaan dengan pengambilan keputusan pelepasan lahan sendiri tiga posisi muncul atas dasar konstruksi-konstruksi diskursus yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama, berkaitan dengan keterpaksaan atas kondisi yang mendesak muncul pemosisian subjek sebagai agen sosial yang bertanggungjawab. Agen sosial yang dalam hal ini mengambil pilihan rasional demi menawarkan suatu cara penyelesaian masalah. Subjek juga diandaikan memiliki sensitivitas atas relasi yang perlu dipertahankan. Kedua, berkenaan dengan penanggulangan risiko, didapati pemosisian subjek sebagai individu rasional yang mengambil keputusan berdasarkan asumsi meminimalkan risiko serta penaksiran jangka panjang. Terakhir, pemosisian lain muncul seiring friksi antara keinginan subjek untuk mempertahankan sarana produksi bersisian dengan persepsi akan gerakan yang dianggap

melemah. Posisi yang muncul dari ketegangan ini ialah sesosok individu dengan keteguhan hati serta penaksiran mengenai konsekuensi logis dalam mengambil keputusan di tengah pilihan yang dilematis.

Praktik

Pada tahap kelima ini dikemukakan relasi antara diskursus dan praktik. Hal tersebut menyuguhkan eksplorasi tentang cara-cara saat konstruksi diskursus dan posisi subjek yang ada di tengah-tengahnya membuka atau menutup kemungkinan untuk aksi. Dengan mengkonstruksikan suatu cara pandang tertentu terhadap realitas, dan dengan menaruh posisi subjek berdasar hal tersebut, diskursus diandaikan akan menyuguhkan batas-batas bagi apa yang dapat dikemukakan serta dapat dilakukan oleh subjek. Penelitian yang dilakukan penulis (Pratama, 2018) memberikan gambaran bahwa gagasan akan batas ini akan muncul seturut pelbagai kerangka diskursus yang mengemuka sebelumnya.

Konstelasi yang hadir mendasari batas-batas tentang apa yang mungkin dibayangkan, dipertimbangkan, dan dengan demikian dilakukan. Terkait identitas petani, kemungkinan yang terbuka ialah tindakan untuk mengukur berbagai pilihan berdasarkan keuntungan dan kerugian serta berpatokan pada keputusan yang rasional (Pratama, 2018). Posisi sebagai manusia ekonomi menempatkan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi sebagai praktik yang rasional. Bersisian dari konsepsi identitas petani yang menjadi sinonim dari manusia ekonomi, terbuka pula otonomi yang memungkinkan eksplorasi atas waktu kerja serta penentuan standar pekerjaan yang harus dilakukan secara mandiri. Di sisi lain, paparan atas konsepsi kepemilikan lahan menyediakan opsi praktik penaksiran atas risiko dan upaya memperoleh jaminan atas kondisi hidup yang lebih stabil. Silang sengkabut terkait kemungkinan praktik berdasar ukuran utilitas dan gagasan soal jaminan itu menjadi tumpuan pula bagi kemungkinan praktik dalam ranah pengambilan keputusan. Opsi praktik yang kemudian dimungkinkan ialah posisi individu yang melihat bahwa keputusan yang diambil mewakili sebuah upaya meredakan kondisi yang menekan dan menimbulkan ketegangan. Hal ini sejalan dengan adanya penekanan posisi sebagai individu rasional di tengah pengambilan keputusan. Sebuah konstruksi yang membawa individu menaksir kemungkinan-kemungkinan serta memilih pilihan yang sekiranya paling terjamin dan memiliki risiko lebih kecil. Dengan demikian, pengambilan keputusan pelepasan lahan mendapatkan dalihnya yang solid sebagai konsekuensi logis dari upaya penaksiran rasional yang disertai risiko yang masih dapat ditanggung.

Subjektivitas

Pada tahapan ini, dilukiskan apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh informan berdasar pemosisian yang tersedia. Secara mendasar konstelasi diskursus yang telah diuraikan sebelumnya turut membentuk ruang tertentu bagi ekspresi pikiran maupun perasaan individu. Pada hasil penelitian peneliti (Pratama, 2018) didapatkan beberapa ekspresi perasaan dan pikiran yang secara tidak langsung mencerminkan cara kerja diskursus mengerangkai keduanya. Berkenaan dengan identitas sebagai petani, yang dikerangkai oleh diskursus yang mendorong posisi penaksir rasional sebagai fokus, apa yang kemudian dirasakan oleh subjek ialah pemosisian petani sebagai sinonim sarana pencapaian kesejahteraan. Posisi petani sebagai identitas yang menyusun konsep diri mereka sebagai subjek, lantas tidak dilihat sebagai identitas yang terekspresikan dalam suatu nilai dan sikap terhadap alam secara umum tetapi terkungkung oleh kategori ekonomi: untung-rugi. Hal ini pulalah yang membuat petani ditempatkan oleh para subjek sebagai opsi terakhir bila di depan mereka terhampar daftar profesi yang dapat dipilih bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, adanya kebebasan yang inheren dalam pola kerja petani membuat subjek mengamini adanya perasaan bebas serta kesadaran bahwa mereka memegang kendali penuh atas pola dan sistem kerja yang dilakukan.

Di tengah ketegangan perihal identitas itu isu tentang kepemilikan lahan juga menyuguhkan suatu perasaan kebebasan yang disertai nuansa dilematis. Dua pilihan tertaut menjadi satu, yakni adanya perasaan bebas dari aturan tanpa jaminan legalitas melalui pengakuan kepemilikan lahan berdasarkan pengolahan lahan. Di sisi yang lain, ada pilihan lain untuk tetap bertahan dengan bertaruh di arena legal dengan risiko bekemungkinan kalah guna mendapatkan jaminan legalitas. Perasaan yang mengemuka di tengah posisi seperti itu ialah rasa was-was akan kepastian kepemilikan lahan. Perasaan was-was itu berjejalin dengan posisi yang mendesak petani untuk mengambil keputusan di tengah lingkungan sosialnya guna mengatasi situasi mendesak yang dihadapi. Pemikiran umum yang muncul, dan kemudian menjadi dalih yang sah, ialah upaya mengedepankan keharmonisan relasi dengan lingkungan sekitar serta kondisi yang baik-baik saja di dalam keluarga.

Gagasan relasional ini juga bertaut dengan argumen rasional terkait perkiraan atas pelbagai kemungkinan yang tersedia. Terutama penaksiran yang mengarah pada pemilihan opsi yang sekiranya paling terjamin dan memiliki risiko lebih kecil. Upaya penaksiran atas risiko yang muncul bila tetap berupaya bertahan secara tidak langsung menyiratkan identifikasi subjek ke dalam posisi rentan. Terutama karena opsi- yang tersedia dan beriringan dengan upaya mempertahankan lahan diselimuti risiko. Hal ini semakin menajam ketika petani merasa dukungan kolektif untuk berjuang semakin melemah di satu sisi, dan di sisi yang lain merasa risiko yang perlu ditanggung secara personal begitu besar. Pada akhirnya pelepasan lahan dianggap sebagai konsekuensi yang rasional atas situasi problematis tersebut. Selain itu, posisi terdesak yang dirasakan para petani juga dinyatakan secara tersirat dalam pelbagai evaluasi negatif atas hilangnya sumberdaya produksi yang mereka lepaskan.

Penutup: Pertanyaan sebagai Jawaban

Mengacu pada paparan terkait cara kerja ADF di atas kita dapat melihat bahwa ADF dapat dipakai sebagai langkah awal menghalau individualisme metodologis. Terutama karena ADF tidak meninggalkan individu beserta pikirannya sendirian sebagai satu-satunya sarana penjas bagi keputusan maupun tindakan yang dilakukan. ADF menyuguhkan gambaran umum tentang konstelasi diskursus yang memungkinkan individu memikirkan suatu hal dengan suatu cara tertentu yang berimplikasi pada cara bertindak yang tertentu pula. Gagasan mengenai diskursus sebagai sumber dari keputusan atau tindakan menggambarkan hasrat untuk bergerak lebih jauh dan mencari penjelasan di luar proses mental individu. Cara pikir dengan ADF ini sejalan dengan pernyataan Willig (2013) bahwa, “ADF juga menaruh perhatian pada peran diskursus di tengah proses sosial yang lebih luas dari legitimasi dan kuasa.” Berhubungan dengan hal tersebut, kita dapat berargumen bahwa pemakaian ADF dapat membantu kita memetakan restriksi seperti apa yang mengurung seseorang dalam ceruk kultural atau sosial tertentu. Di sisi yang lain, kita juga melihat apa yang menjerat dan mengindarkan mereka dari otonomi. Dengan kata lain, kita dapat menangkap gambaran terkait cara kerja kuasa mengikat individu dan menjeratnya dari gagasan perubahan. “Lantaran diskursus memungkinkan suatu cara pandang dan juga suatu cara bersikap, secara kuat dengan demikian ia terlibat dalam praktik penggunaan kuasa. Diskursus dominan yang mengemuka memberikan suatu tempat istimewa bagi versi realitas sosial yang melegitimasi relasi kuasa dan struktur sosial yang ada.” Dengan begitu, ketika kita menyisir sebuah konstruksi diskursus kita dapat membuka percakapan mengenai relasi kuasa dan juga mengajukan pertanyaan yang lebih tepat untuk meredakan penggunaan kuasa yang menciptakan ketidaksetaraan, baik secara mental-psikologis maupun dalam bentuk material.

Beberapa diskursus mengakar dalam praktik sosial sehari-hari, dan ini membuah mengakar dalam praktik sosial sehari-hari, sehingga membuat kita sulit untuk mencari jalan untuk menantang atau menentangnya. Diskursus tersebut telah menjadi sesuatu yang meresap dalam kehidupan keseharian dan menjadi suatu nalar wajar dalam kehidupan sosial. Namun, di saat yang bersamaan, sebagaimana diskursus disusun oleh suatu jejaring makna; maka bahasa masih lah menjadi sesuatu yang esensial dari diskursus. Mengikuti konsepsi ini, kita lantas dapat membayangkan bahwa ADF dapat digunakan sebagai cara untuk mencerabut efek dari diskursus melalui paparan analisis. Dengan melakukan hal ini kita juga dapat menunjukkan hal yang khas dari bahasa itu sendiri, yakni terbuka terhadap pelbagai konstruksi. Mengikuti gagasan ini pula kita dapat membentuk suatu konstruksi alternatif yang dapat digunakan untuk menantang diskursus dominan yang mengemuka. Dengan kata lain, mengurai jerat yang mengikat individu dan mengaburkan bayangan mereka terkait perubahan sosial.

Sebagai bagian dari gagasan kritik, selain sebagai sebuah cara untuk menghindari jebakan individualisme metodologis, kita dapat menemukan manfaat lain dari penggunaan ADF sebagai metode analisis. Sesuai dengan logika yang ditawarkan psikologi diskursif, apa yang lantas bisa dihindari ADF adalah masalah etika berkaitan dengan tendensi '*blaming the victim*'. Hal ini dapat dicapai dengan menempatkan fokus pada gagasan perihal wacana, dibandingkan berfokus pada cara berpikir individual. Sebagaimana pula yang telah dinyatakan Willig (2013), sebagai salah satu pertimbangan etis, "konsep psikologis seperti prasangka, identitas, ingatan, dan rasa percaya (*trust*) dipandang sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang alih-alih sesuatu yang mereka miliki atau memang mereka miliki." Mengikuti gagasan ini, ADF dapat digunakan untuk mengelak dari upaya mengatribusikan beragam kesalahan kepada individu. Terutama karena ADF membantu kita untuk berpikir bahwa ada beberapa konstruksi diskursif yang membatasi cara berpikir orang.

Aspek lain dari wacana seperti dicatat oleh Ian Parker (1992) "Kita tidaklah 'menemukannya', tetapi diskursus itu sendiri tersedia bagi kita sebagai sebuah topik, dan kita harus campur tangan dalam kontradiksi yang dikandungnya." Di tengah sejumlah besar sikap pasrah yang tumbuh karena perangkap wacana, kita bisa memanfaatkan ADF untuk mengajukan pertanyaan yang tepat bagi upaya mendukung gagasan akan perubahan sosial. Namun demikian hal ini perlu disokong dengan kehadiran pikiran kita mengingat bahwa analisis wacana merupakan penyembuh sekaligus bagian dari penyakit karena sebagaimana yang dicatat Parker (1992) "keasyikan terhadap bahasa (sebagai objek kajian) dalam psikologi kontemporer adalah gejala penghindaran dari (kajian tentang) penindasan berbasis material dari pihak akademisi." Agar kita dapat menjernihkan seluk-beluk suatu wacana dominan, kita perlu menemukan basis materiil di luar wacana yang memungkinkan wacana itu mengemuka dan dipertahankan. Meskipun begitu, sebagai batu loncatan awal, ADF dapat digunakan sebagai alat yang menguntungkan dalam upaya menemukan pertanyaan yang tepat untuk dijawab karena, meneruskan Parker, "perhatian terhadap bahasa juga dapat memfasilitasi proses politisasi kehidupan sehari-hari secara progresif" (Parker, 1992).

Daftar Acuan

- Bhaskar, R. (2008). *A realist theory of science*. London: Routledge.
- Handayani, C.S. (2002). Psikologi sebagai studi tentang aspek mental bahasa. *Suksma* Vol. 1. No. 1, hal 39-46.
- Hartoko, V.D.S. (2002). Kisah-kisah pribadi di ruang publik. *Suksma* Vol. 1. No. 1, hal 19-28.
- Harre, R. & Davies, B. (1999). Positioning and personhood. Dalam R. Harre & L. van Langenhove (peny.), *Positioning theory: Moral contexts of intentional action*. Oxford: Blackwell.
- Herry-Priyono, B. (2006). Homo oeconomicus: Dari pengandaian ke kenyataan. Dalam I. Wibowo

- & B. Hery-Priyono (peny.), *Sesudah filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno*, hal 87-132, Yogyakarta: Kanisius.
- Madyaningrum, M.E. (2011). Soul and solution: Lay thinking about psychology and psychologists in Indonesia dalam Christina S. Handayani & Monica E. Madyaningrum (peny.), *Exploration of asian indigenous perspective: Communalities and differences (Proceeding of International Conference of Revisited Asian Society)* hal. 284-292, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Parker, I. (1992). *Discourse dynamics: Critical analysis for social and individual psychology*. London: Routledge.
- Pratama, R.A. (2018). Dalih pelepasan lahan massal: Analisis wacana pengambilan keputusan pelepasan lahan untuk tambang pada petani lahan Pantai Kulon Progo (*Skripsi Sarjana*). Diakses dari <http://repository.usd.ac.id/27326/>
- Sims-Schouten, R., Sarah, C.E., & Willig, C. (2007). Critical realism in discourse analysis a presentation of a systematic method of analysis using women's talk of motherhood, childcare and female employment as an example. *Theory & Psychology Vol. 17 (1)*, hal 101-124.
- Smith, J.A. (2007). *Qualitative psychology: A practical guide to research methods*. Sage: California.
- Widiyanto, Y.B.C. (2017). *Krisis psikologi dan psikologi kritis: Menakar konteks dalam memahami subyektivitas*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Willig, C. (2013). *Introducing qualitative research in psychology*. Open University Press: Maidenhead.